



Pemkot Perbaiki Pelayanan 13 SKPD

YOGYA, TRIBUN - Dalam satu pekan ke depan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki rapor merah dan kuning akan terus digenot agar bisa memperbaiki kualitas pelayanan. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

"Dalam satu minggu ke depan pembenahan akan dilakukan kepada 13 SKPD yang masih memiliki kekurangan," kata Kris Sardjono Sutedjo, Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Jumat (23/5).

Sebelumnya, pada akhir 2013 lalu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan survei pelayanan publik terhadap 13 SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Dari survei tersebut diketahui ada beberapa SKPD yang memiliki nilai yang jelek dan mendapatkan rapor merah dan kuning, serta ada beberapa SKPD seperti Dinas Perizinan yang mendapatkan nilai hijau.

Selain 13 SKPD tersebut, peningkatan kualitas pelayanan juga akan dilakukan kepada instansi dan unit kerja yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga sekolah-sekolah yang jumlah totalnya mencapai 250 unit.

Kris Sardjono menyebutkan, peningkatan kualitas tersebut akan di fokuskan ke kualitas informasi pelayanan publik. "Akan kita benahi ke hal yang lebih informatif, yang selama ini belum maksimal," tambah Kris.

Menurut dia, sebenarnya fasilitas untuk pelayanan publik sudah ada, namun informasi untuk mengakses pelayanan tersebut sering tidak ada. "Seperti papan atau informasi mengenai alur untuk mengurus pelayanan, biaya, dan sebagainya," ujarnya.

Ditargetkan pada 2014 ini, semua SKPD, instansi, unit kerja, dan yang lainnya bisa mendapatkan nilai yang baik. "Target tahun ini semua bisa hijau," ujar Kris Sardjono.

Standar Pelayanan

Kepala Pelaksana (Plt) Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY-Jateng, Budhi Masturi, menyebutkan, bahwa komitmen Pemkot dalam upaya perbaikan pelayanan cukup bagus. Sebab Pemkot tidak hanya berkomitmen memperbaiki SKPD yang punya rapor buruk, namun juga ke SKPD, instansi, dan unit pelayanan yang lain.

"Sebenarnya SKPD dan instansi sudah punya semua standar pelayanan, namun kurang diinformasikan," kata Budhi.

Dalam penilaian yang akan dilakukan secara tertutup, SKPD juga diminta menilai sendiri pelayanan yang diberikan. Hasilnya akan dibandingkan dengan hasil penilaian ORL.

Tindak lanjut dari penilaian tersebut, pada 18 Juni 2014 akan ada penyerahan "certificate of compliance". Penghargaan tersebut akan diberikan kepada SKPD yang memiliki kepatuhan tertinggi terhadap pelaksanaan UU No 25 tahun 2009. Tanggal tersebut juga dicantumkan sebagai hari kualitas pelayanan publik. (dnh)

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005